



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik merupakan masalah sosial yang dialami oleh semua negara. Konflik yang terjadi dalam suatu negara dapat mengarah pada disintegrasi dan berpotensi menjadi masalah berkepanjangan bagi kalangan elit, kalangan cendekiawan, dan kalangan awam (Herman & Nurdiansa, 2010, p. 154). Konflik dapat diartikan sebagai pertarungan antara dua pihak atau lebih, bisa individu maupun kelompok yang biasanya disebabkan oleh perbedaan nilai, pandangan, aktivitas, status, dan kelangkaan sumber daya alam (Marina & Dharmawan, 2011, p. 91). Selain itu, konflik juga dapat disebabkan oleh persoalan yang menyangkut ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan politik (Juditha, 2016, p. 94).

Apapun sebabnya, konflik seringkali dijadikan bahan pemberitaan oleh media. Hal ini dikarenakan konflik mampu menarik pembaca, sehingga konflik bahkan dijadikan salah satu nilai berita. Wakos Reza Gautama dalam Setyawan et al. (2012), mengatakan bahwa konflik merupakan nilai berita, sehingga ada media yang memberitakannya dengan bumbu sensasional, dan ada yang memberitakan apa adanya (Setyawan et al., 2012, p. 7).

Dalam memberitakan konflik, media bisa menjadi alat untuk mendamaikan pihak yang berkonflik bila pesan-pesan yang disampaikan

mengandung toleransi, bersifat meredam kebencian, serta objektif. Sebaliknya, media bisa menjadi pihak yang memperburuk kondisi bila pesan-pesan yang disampaikan justru memprovokasi pihak-pihak yang berkonflik untuk semakin saling membenci. Dalam memberitakan konflik, media dan para jurnalisnya mudah kehilangan profesionalitasnya, dan mendukung pihak tertentu karena adanya kesamaan (Setyawan et al., 2012, p. 11-12).

Sebagai contoh, beberapa media *mainstream* di Lampung diduga tidak memberitakan konflik antar penduduk Desa Agom dengan penduduk Desa Balinuraga, di Kecamatan Waypanji, Kabupaten Lampung Selatan secara profesional. Konflik ini bermula pada 27 Oktober 2012 ketika dua penduduk Desa Agom, Nurdiyana Dewi dan Emiliya Elisa, sedang naik motor menuju rumah. Di tengah perjalanan, kedua penduduk Desa Agom tersebut dijahili dan diganggu oleh sekelompok pemuda dari Desa Balinuraga hingga motornya terjatuh dan kedua penumpangnya luka memar di tangan dan kaki. Namun, berita yang beredar di kawasan tersebut malah berupa berita pelecehan seksual yang dilakukan oleh sekelompok pemuda Desa Balinuraga kepada gadis-gadis Desa Agom. Hal ini yang akhirnya memicu konflik berdarah antara Desa Agom dan Desa Balinuraga (Setyawan et al., 2012, p. 5-7).

Media-media di Lampung banyak yang memberitakan bahwa konflik antar penduduk desa tersebut dipicu oleh pelecehan seksual. Bahkan, ada juga media yang mengaitkan konflik ini dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, dengan memberitakan bahwa Hari Sumpah Pemuda ternyata belum bisa

mempersatukan pemuda karena di Lampung Selatan para pemuda justru berkonflik (Setyawan et al., 2012, p. 157-163). Menurut Rusdi Marpaung dalam Setyawan et al.(2012), terdapat dalih bahwa media massa bukan pihak yang memulai konflik, tetapi pihak yang dapat menyuburkan konflik dan kekerasan lanjutan bila tidak memperhatikan dampak pemberitaan terhadap konflik itu sendiri (Setyawan et al., 2012, p. 166).

Namun, tidak semua media bersikap tidak profesional dalam memberitakan konflik. Dalam kasus konflik Tolikara, media daring Tempo.co memberitakan konflik tersebut secara objektif, tidak mendukung salah satu pihak. Dalam dua hari, yaitu 17 dan 18 Juli 2015, Tempo.co mempublikasi 37 berita tentang konflik Tolikara. Dalam jumlah berita tersebut, mayoritas memberitakan akar permasalahan konflik dan menjadikan orang-orang yang mendukung perdamaian sebagai narasumber (Juditha, 2016, p. 108). Dalam memberitakan konflik Tolikara tersebut, Tempo.co tetap mempertahankan objektivitasnya sehingga tidak mendukung pihak tertentu.

Selain itu, setiap media memiliki ideologi yang berbeda sehingga memiliki pandangan yang berbeda pula mengenai sebuah konflik. Sebagai contoh, vivanews.co.id dan detiknews.com sama-sama memberitakan konflik antara Polri dan petinggi KPK, yang dimulai pada 13 Januari 2015 saat KPK mengumumkan Budi Gunawan (kandidat tunggal Kapolri saat itu) sebagai tersangka kasus korupsi saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006. Namun,

vivanews.co.id cenderung memberitakan konflik tersebut dengan menuding KPK sebagai pihak yang bersalah dan penyebab konflik. Sementara itu, detiknews.com cenderung memberitakan konflik tersebut dengan menuntut Presiden Jokowi agar segera menyelesaikan konflik tersebut dengan acuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam memberitakan konflik yang sama, vivanews.co.id lebih fokus terhadap sebab dari konflik, sementara detik.com fokus terhadap solusi yang bisa diambil untuk menyelesaikan konflik (Gaio, Mondry, & Diahloka, 2015, p. 454-455).

Contoh lain adalah dalam pemberitaan konflik Israel dan Palestina oleh Harian Kompas dan Radar Sulteng pada 2010 juga dapat ditemukan perbedaan. Menurut Herman dan Nurdiansa (2010), dalam pemberitaan Harian Kompas, Palestina cenderung dijadikan sebagai penyebab dari konflik yang berlangsung. Harian Kompas juga melihat konflik Israel dan Palestina sebagai peristiwa berskala nasional. Sedangkan Radar Sulteng cenderung menjadikan Israel sebagai penyebab konflik, dan melihat konflik tersebut sebagai peristiwa berskala lokal, yaitu peristiwa ketika Kota Gaza terkepung oleh tentara Israel (Herman & Nurdiansa, 2010, p. 164, 167).

Salah satu konflik yang menyita perhatian media seluruh dunia adalah konflik antara etnis Rohingya dan militer Myanmar. Konflik ini berawal pada abad 8 ketika orang-orang beretnis Rohingya dari Asia Selatan datang ke wilayah yang sekarang menjadi wilayah Myanmar, dan mendirikan kerajaan di Arakan (sekarang Rakhine). Pada tahun 1784, Raja Burma menaklukan Arakan, yang lalu berimbas pada mengungsinya ratusan ribu orang beretnis

Rohingya ke wilayah yang sekarang menjadi wilayah India dan Bangladesh. Sejak saat itu, orang-orang beretnis Rohingya yang tetap tinggal di wilayah Burma selalu berkonflik dengan orang-orang Burma (Wandha, 2017, para. 5-7).

Pada tahun 1982, pemerintah Burma menetapkan status imigran ilegal pada orang-orang beretnis Rohingya yang menetap di wilayah Burma. Bahkan ketika pada tahun 1989, militer Myanmar berkuasa dan mengubah nama 'Burma' menjadi 'Myanmar', etnis Rohingya tetap tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Pada tahun 1991, lebih dari 250.000 orang beretnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, menghindari penyiksaan, kerja paksa, serta pemerkosaan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Namun, pada tahun 1992 hingga 1997, terdapat perjanjian repatriasi antara militer Myanmar dengan etnis Rohingya yang menyebabkan kembalinya sekitar 230.000 pengungsi Rohingya ke Myanmar, tepatnya wilayah Utara Rakhine (Wandha, 2017, para. 20-23).

Namun, sejak saat itu etnis Rohingya tetap tidak diakui sebagai warga negara dan diberikan peraturan ketat agar tetap bisa tinggal di wilayah Myanmar. Hal ini menjadikan etnis Rohingya akhirnya berontak dan balas menyerang militer Myanmar. Pada tahun 2016, kelompok militan Rohingya, Harakah al-Taqin menyerang pos-pos penjaga perbatasan Myanmar-Bangladesh dan menewaskan 9 tentara Myanmar. Militer Myanmar membalas serangan ini dengan melakukan pembunuhan, pembakaran dan pemerkosaan di pemukiman etnis Rohingya. Akibat insiden itu, ratusan ribu

etnis Rohingya kembali mengungsi ke Bangladesh (Wandha, 2017, para. 40-43).

Pada 25 Agustus 2017, *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) melakukan serangan ke pos-pos polisi Myanmar di wilayah Rakhine, dan menewaskan 12 polisi Myanmar (BBC Indonesia, 2017, para. 3). Serangan itu memicu serangan balik dari pihak Myanmar yang melakukan serangan besar-besaran ke pemukiman Rohingya. Hal ini membuat ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Akses media ke wilayah Rakhine dipersulit oleh militer Myanmar sehingga sulit untuk melakukan liputan lapangan mengenai kondisi pemukiman etnis Rohingya tersebut (BBC Indonesia, 2017, para. 20-23).

Di sisi lain, banyaknya pengungsi Rohingya di Bangladesh menyebabkan sumber daya nasional Bangladesh terpakai untuk kelangsungan hidup para pengungsi. Namun pihak Bangladesh tidak bisa begitu saja mengirim kembali pengungsi Rohingya ke Myanmar karena perlakuan militer Myanmar terhadap mereka (Parnini, 2013, p. 287-288). Bila melihat data tersebut, kita melihat bahwa etnis Rohingya dapat dilihat sebagai korban, namun bisa menjadi 'pengganggu' bila dilihat dari sudut pandang pemerintah Bangladesh. Media memiliki peran dalam menentukan bagaimana masyarakat dunia melihat peran etnis Rohingya, militer Myanmar, dan pemerintah Bangladesh (Parnini, 2013, p. 294).

Banyak media di Indonesia yang memberitakan mengenai konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar. Hal tersebut disebabkan karena salah satu

pihak yang berkonflik, yaitu etnis Rohingya merupakan etnis yang orang-orangnya beragama Islam, sedangkan masyarakat Indonesia pun mayoritas beragama Islam. Hal ini menimbulkan rasa solidaritas masyarakat Indonesia terhadap etnis Rohingya, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang menaruh perhatian pada kondisi konflik antara etnis Rohingya dan militer Myanmar.

Pemberitaan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar oleh media-media di Indonesia memiliki fungsi lain selain untuk memberikan informasi terkini terkait dengan konflik tersebut. Pemberitaan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar oleh media-media di Indonesia juga dapat berfungsi sebagai sebuah usaha pencegahan agar tidak terjadi masalah baru di Indonesia yang berkaitan dengan konflik yang terjadi di Myanmar. Bila terjadi masalah baru di Indonesia yang terkait dengan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar, maka masalah tersebut berpotensi menghambat proses perdamaian untuk konflik yang terjadi di Myanmar.

Beberapa peristiwa bahkan telah terjadi di Indonesia akibat konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar. Peristiwa yang pertama adalah demonstrasi yang terjadi di depan Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia pada 5 September 2017 lalu. Pada demonstrasi itu, demonstran bahkan sampai melempari Kedutaan Besar Myanmar dengan batu sebagai bentuk protes terhadap serangan-serangan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya (Putra, 2017, para. 1-2).

Peristiwa kedua adalah organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang pada 6 September 2017 lalu menyatakan bahwa ribuan anggotanya siap untuk berangkat ke Myanmar untuk membantu etnis Rohingya melawan militer Myanmar (Taylor, 2017, para. 3-4). Kedua peristiwa tersebut tidak menjadikan kondisi konflik membaik, bahkan berpotensi memperburuk kondisi konflik antara etnis Rohingya dan militer Myanmar.

Dalam memberitakan konflik, termasuk konflik antara etnis Rohingya dan militer Myanmar, media mengenal istilah jurnalisme damai. Jurnalisme damai merupakan suatu bentuk jurnalisme yang memiliki fokus pemberitaan untuk menciptakan peluang terwujudnya perdamaian, khususnya dalam memberitakan konflik (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 5). Dalam pemberitaannya, jurnalisme damai tidak menggunakan kata-kata yang menggambarkan kekerasan, tidak membela salah satu pihak, serta berusaha membangun suatu pemahaman di masyarakat bahwa ada solusi untuk konflik yang sedang terjadi (Tehrani, 2002, p. 60).

Meskipun masih terdapat kritik terhadap jurnalisme damai yang dianggap sebagai bentuk intervensi yang berlebihan dari media, namun seringkali jurnalisme damai tetap dibutuhkan agar konflik yang terjadi tidak menjadi lebih besar. Menurut Lynch dan McGoldrick (2005), sikap jurnalis yang hanya mengabarkan fakta tidak akan berdampak positif bagi berita yang dihasilkan (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 14).

Terdapat dua alasan mengapa jurnalis boleh melakukan intervensi untuk membantu menyelesaikan konflik lewat jurnalisme damai. Pertama,

jurnalis sebagai manusia selalu memiliki perasaan dan opini pribadi terhadap peristiwa konflik yang mereka beritakan. Jika jurnalis berusaha tidak memperhatikan perasaan dan opini pribadinya, dan memaksakan diri untuk bersikap netral, maka secara tidak sadar opininya akan ditulis menyerupai fakta (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 15). Kedua, sikap objektif jurnalis yang ditampilkan sebagai ‘hanya menyampaikan fakta’ dapat menyebabkan masyarakat tidak akan melihat cara-cara alternatif untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 15-16).

Dalam menerapkan jurnalisme damai, media hendaknya lebih selektif, mengedepankan kebenaran, serta menyoroti solusi-solusi yang mungkin diambil dalam rangka menyelesaikan konflik (Setyawan et al., 2012, p. 112). Solusi yang dimaksud merupakan solusi yang bersifat ‘sama-sama menang’, di mana semua pihak yang berkonflik harus merasa puas dengan solusi tersebut. Solusi tersebut berbeda dengan solusi yang ditawarkan dalam jurnalisme perang, yaitu solusi yang hanya menguntungkan satu pihak sementara pihak lain dipaksa untuk menerima solusi tersebut agar konflik bisa segera diakhiri (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 20).

Dalam era digital, penerapan jurnalisme damai oleh media-media daring harus lebih ditingkatkan. Hal ini dikarenakan perputaran *The Feedback Loop* dalam media daring lebih cepat dibandingkan dengan media non-daring. Adapun *The Feedback Loop* merupakan konsep yang mengatakan bahwa fakta dari sumber berita akan diolah oleh jurnalis sehingga menjadi sebuah berita. Berita tersebut kemudian dipublikasi oleh media tempat jurnalis

tersebut bekerja. Berita yang sudah dipublikasi oleh media akan dibaca oleh khalayak. Respon khalayak terhadap berita tersebut nantinya akan dirasakan oleh sumber berita, sehingga respon khalayak tersebut akan memiliki dampak tertentu bagi sumber berita (McGoldrick & Lynch, 2000, p. 22-23).

Di media daring, perputaran fakta dari sumber berita, yang diolah menjadi berita, dipublikasi, dibaca oleh masyarakat, hingga menghasilkan efek tertentu bagi sumber berita berjalan sangat cepat. Dalam konteks pemberitaan konflik, bila berita yang dipublikasi oleh media membentuk respon positif dari masyarakat terhadap konflik yang diberitakan, maka pihak-pihak yang berkonflik bisa terpengaruh untuk segera mengakhiri konflik. Namun, bila berita justru menghasilkan respon negatif masyarakat terhadap konflik yang diberitakan, maka sumber berita bisa terprovokasi untuk melanjutkan konflik (McGoldrick & Lynch, 2000, p. 24). Oleh karena itu, jurnalisme damai penting untuk diterapkan oleh media daring saat memberitakan konflik karena efek dari pemberitaan konflik oleh media daring akan cepat diketahui dan mempengaruhi pihak-pihak yang berkonflik.

Di Indonesia, terdapat media-media daring yang sudah mendapatkan predikat 'terverifikasi faktual dan administrasi' dari Dewan Pers. Hingga penelitian ini dibuat, terdapat 59 media daring yang sudah mendapatkan predikat tersebut (Dewan Pers, 2018). Dewan Pers menyebut uji verifikasi terhadap perusahaan pers sebagai amanat UU No. 40 Tahun 1999, tentang pers untuk mendata perusahaan pers. Selain itu, uji verifikasi ini juga bertujuan untuk memastikan komitmen perusahaan pers dalam menjaga

profesionalitas dan perlindungan wartawan guna mewujudkan kemerdekaan pers (Priyonggo, 2017, para. 2). Salah satu media daring yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers adalah Tirto.id.

Menarik untuk mengetahui apakah Tirto.id, sebagai media daring yang sudah lulus uji verifikasi Dewan Pers menerapkan jurnalisme damai dengan baik ketika memberitakan konflik, khususnya konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar, khususnya pada periode 24 November 2016 hingga 28 Mei 2018. Terlebih lagi Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetya dalam Priyonggo (2017) mengatakan bahwa uji verifikasi tersebut juga bertujuan untuk memastikan media-media di Indonesia sudah menjalankan perannya. Peran media yang dimaksud adalah menyampaikan informasi kepada publik secara jujur dan berimbang, serta bebas dari tekanan kapitalisme dan politik (Priyonggo, 2017, para. 3).

Selain statusnya sebagai media daring terverifikasi oleh Dewan Pers, pemilihan Tirto.id sebagai objek penelitian juga disebabkan karena Tirto.id merupakan media daring yang serius dalam memberitakan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar. Keseriusan Tirto.id dalam memberitakan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar terlihat dengan jalinan kerjasama Tirto.id dengan wartawan di wilayah yang terkena dampak konflik antara etnis Rohingya dan militer Myanmar, menjadikan wartawan lokal tersebut sebagai kontributor lepas. Bentuk kerjasama ini dapat dilihat dalam artikel berjudul “Cerita Memilukan Pengungsi Rohingya dari Buthidaung”. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa kontributor lepas Tirto.id yang

berada di perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh melakukan wawancara langsung dengan para pengungsi Rohingya (Hanifan, 2017, para. 17).

Dengan menjadikan wartawan yang berada dekat dengan zona konflik sebagai kontributor lepas, Tirto.id dapat mempublikasi artikel yang berasal dari hasil laporan pandangan mata dengan wawancara langsung dengan pihak yang mengalami dampak konflik. Selain itu, foto-foto yang digunakan dalam artikel tersebut juga merupakan hasil karya kontributor lepas Tirto.id yang diambil khusus untuk Tirto.id. Foto-foto tersebut tentu menampilkan sesuatu yang berbeda dengan foto-foto dari kantor berita internasional yang sering digunakan oleh media-media daring Indonesia.

Selain memiliki kontributor lepas di wilayah yang terkena dampak konflik, Tirto.id juga melakukan wawancara lewat telepon dan *Skype* dengan narasumber-narasumber yang berada di Myanmar. Hal tersebut dapat dilihat dalam artikel berjudul “Dubes Ito Sumardi : “Krisis Rohingya bukan Konflik Agama” di mana Tirto.id melakukan wawancara lewat telepon dengan duta besar Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi, mengenai kondisi Myanmar di tengah konflik antara etnis Rohingya dan militer Myanmar (Sumandoyo, 2017, para.11). Selain itu, Tirto.id juga melakukan wawancara lewat *Skype* dengan dr. Natasha Reyes, Direktur Operasional Medecins Sans Frontieres (MSF) mengenai dampak yang ditimbulkan oleh konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar. MSF merupakan organisasi kemanusiaan yang beranggotakan para dokter. Tujuan mereka adalah memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik dan bencana (Putri, 2017, para. 17).

Wawancara dengan dr. Natasha Reyes tersebut digunakan untuk artikel berjudul “Pembantaian Sistematis terhadap Muslim Rohingya”.

Adanya kontributor lepas di wilayah yang terkena dampak konflik dan wawancara langsung dengan narasumber-narasumber yang berada di Myanmar menjadi pembeda Tirto.id dengan media daring lainnya di Indonesia. Namun, Tirto.id juga tetap menggunakan informasi dari kantor berita asing dan media asing untuk berita-berita mengenai konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar lainnya. Pemilihan informasi dari kantor berita asing dan media asing serta terjemahan yang dilakukan oleh Tirto.id terhadap informasi tersebut juga bisa menjadi indikasi mengenai penerapan jurnalisme damai di Tirto.id. Oleh karena itu, menarik untuk menganalisis penerapan jurnalisme damai di media daring Tirto.id dalam pemberitaan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka didapatkan sebuah rumusan masalah, yaitu :

Bagaimana penerapan jurnalisme damai di media daring Tirto.id dalam pemberitaan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar?

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka terdapat beberapa pertanyaan pendukung yang perlu diperhatikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain :

- a. Apakah jurnalis Tirto.id berorientasi pada konflik dalam memberitakan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar?
- b. Apakah jurnalis Tirto.id berorientasi pada kebenaran dalam memberitakan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar?
- c. Apakah jurnalis Tirto.id berorientasi pada masyarakat dalam memberitakan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar?
- d. Apakah jurnalis Tirto.id berorientasi pada pencapaian solusi dalam memberitakan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar?
- e. Apakah *The Feedback Loop* dalam pemberitaan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar di Tirto.id mengalami perputaran sempurna?

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka didapatkan satu tujuan penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui apakah jurnalis Tirto.id berorientasi pada konflik dalam memberitakan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar.
- b. Untuk mengetahui apakah jurnalis Tirto.id berorientasi pada kebenaran dalam memberitakan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar.
- c. Untuk mengetahui apakah jurnalis Tirto.id berorientasi pada masyarakat dalam memberitakan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar.
- d. Untuk mengetahui apakah jurnalis Tirto.id berorientasi pada pencapaian solusi dalam memberitakan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar.
- e. Untuk mengetahui apakah *The Feedback Loop* dalam pemberitaan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar di Tirto.id mengalami perputaran sempurna.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Peneliti berharap penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai jurnalisme damai, khususnya pada penerapannya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah minat akademisi lain untuk melakukan penelitian mengenai jurnalisme damai di Indonesia secara lebih mendalam dan komprehensif.

Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai *The Feedback Loop* dan kaitannya dengan pemberitaan konflik. *The Feedback Loop* merupakan konsep yang dimiliki oleh setiap media, baik itu cetak, siar, maupun daring, sehingga diperlukan lebih banyak penelitian mengenai *The Feedback Loop* dan pengaruhnya terhadap pemberitaan konflik oleh media-media di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan minat para akademisi ilmu jurnalistik untuk membuat penelitian-penelitian lain terkait dengan *The Feedback Loop*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Bagi jurnalis-jurnalis Tirto.id, penelitian ini berguna untuk mengetahui tingkat penerapan jurnalisme damai di medianya dalam pemberitaan konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar. Dengan mengetahui tingkat penerapan jurnalisme damai di medianya, diharapkan jurnalis-jurnalis Tirto.id dapat

mempertahankan hal-hal yang sudah baik, dan meningkatkan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan.

Bagi jurnalis media daring yang ingin meningkatkan penerapan jurnalisme damai dalam berita-berita yang dibuat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai sejauh mana jurnalisme damai diterapkan di Indonesia. Sehingga jurnalis yang ingin meningkatkan penerapan jurnalisme damai dapat mengetahui aspek jurnalisme damai yang sudah diterapkan dengan baik dan aspek jurnalisme damai yang masih kurang penerapannya. Dengan begitu, jurnalis tersebut dapat membuat strategi yang tepat guna meningkatkan penerapan jurnalisme damai di media daring.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Bagi masyarakat, penelitian ini berguna agar masyarakat mendapat gambaran mengenai kondisi pemberitaan konflik oleh media di Indonesia, khususnya media daring di Indonesia, khususnya Tirto.id. Dengan mengetahui kondisi pemberitaan konflik, maka masyarakat diharapkan mampu menyikapi berita-berita konflik di media daring dengan lebih bijak. Terlebih karena media daring Tirto.id merupakan media daring yang sudah dikenal oleh masyarakat.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada media daring Tirto.id. Hal ini dikarenakan peneliti ingin fokus terhadap media daring yang sudah terverifikasi secara faktual dan administrasi oleh Dewan Pers. Hal ini berkaitan dengan hipotesis peneliti bahwa media daring yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers seharusnya dapat menerapkan jurnalisme damai dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui apakah media daring terverifikasi oleh Dewan Pers memang dapat menerapkan jurnalisme damai dengan baik. Selain itu, peneliti memilih Tirto.id sebagai objek penelitian karena Tirto.id memiliki kontributor di wilayah yang terkena dampak konflik, serta dapat melakukan wawancara jarak jauh dengan narasumber-narasumber di Myanmar.

Penelitian ini juga terbatas pada berita konflik etnis Rohingya dan militer Myanmar. Hal ini disebabkan karena konflik tersebut merupakan konflik yang meliputi aspek-aspek yang dibahas di jurnalisme damai seperti kekerasan, melibatkan kalangan elit politik, melibatkan orang yang berusaha mewujudkan perdamaian, serta proses pencapaian solusi yang sulit. Selain itu, terdapat keterbatasan pula dalam hal pengetahuan informan kunci dan informan pendukung mengenai jurnalisme damai. Oleh sebab itu, daftar pertanyaan terkait dengan jurnalisme damai disusun agar dapat dimengerti dengan mudah oleh informan kunci dan informan pendukung.

Selain hal-hal yang dijelaskan di atas, terdapat pula keterbatasan penelitian pada proses pengumpulan data. Keterbatasan yang dimaksud adalah peneliti tidak boleh membuat dokumentasi ketika melakukan

observasi terhadap diskusi informal yang terjadi antar jurnalis Tirto.id.
Larangan untuk membuat dokumentasi berasal dari pihak Tirto.id yang
merasa keberatan bila diskusi informalnya didokumentasikan.

